

## Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Model Discrepancy Pada Tahap Perencanaan

Septia Rahmawati<sup>1</sup>, Dyah Mustika Kusuma Winahyu<sup>2</sup>, Awalya Siska Pratiwi<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1</sup>, Universitas Jember<sup>2</sup>, Universitas Negeri Malang<sup>3</sup>  
septia.rahmawati@undiksha.ac.id

---

### Article History

accepted 1/7/2025

approved 1/8/2025

published 11/8/2025

---

### Abstract

The evaluation of guidance and counseling is essential for improving unsuccessful programs. Evaluation helps identify various weaknesses in the school's guidance and counseling services. The purpose of this research is to compare the evaluation standards designed by the ASCA (American School Counselor Association) with the reality of program planning, specifically regarding the foundation standards in practice. The subjects of this study are counseling teachers from Padang and Madura. The method used is qualitative evaluative, employing the Discrepancy Evaluation Method. The results indicate that there are still inconsistencies between the established standards and the reality on the ground when developing school guidance and counseling programs for counselees.

**Keywords:** *Evaluation, Discrepancy, Planning*

### Abstrak

Evaluasi dalam bimbingan dan konseling dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah program yang kurang berhasil saat program dilaksanakan, evaluasi memberikan konselor sekolah arah pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan standar evaluasi yang telah dirancang oleh ASCA (American School Counselor Association) dengan perencanaan program khususnya pada standar *foundation* di lapangan. Subjek merupakan guru Bimbingan dan Konseling dari Padang dan Madura. Metode yang digunakan adalah evaluatif kualitatif menggunakan model *Discrepancy Evaluation Method*. Hasil penelitian menunjukkan adanya fakta bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian antara standar yang sudah ditetapkan oleh ASCA (American School Counselor Association) dengan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kesimpulan, menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan program (*foundation*) bimbingan dan konseling di Padang dan Madura masih banyak yang belum mengikuti standar ASCA (American School Counselor Association).

**Kata kunci:** *Evaluasi, Discrepancy, Planning*

---



## PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling merupakan ilmu terapan yang selalu berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Program bimbingan dan konseling sekolah yang disusun merupakan serangkaian rencana aktivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Program harus mampu mewadahi seluruh kegiatan untuk peserta didik dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi/misi yang ada di sekolah. Program Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah merupakan serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan mendukung tercapainya sebuah tujuan pendidikan di Indonesia. Program Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu siswa dalam menghadapi berbagai tantangan akademik, sosial dan emosional guna mencapai perkembangan peserta didik yang optimal (Mustofa et al., 2024).

Dalam ilmu Bimbingan dan Konseling, memandirikan peserta didik adalah tujuan utama dalam setiap layanan yang diberikan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik lewat need assessment. Tanpa melakukan identifikasi yang jelas dan mantap, maka layanan-layanan yang akan diberikan kepada siswa belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa (Sugiyono, 2011). Kebutuhan peserta didiklah yang akan melandasi seluruh layanan dan intervensi yang diberikan oleh konselor sekolah. Konselor sekolah didorong untuk mampu membuat sebuah program sekolah yang berdasarkan kebutuhan dari peserta didik, tentunya dalam membuat sebuah program Bimbingan dan Konseling untuk peserta didik konselor harus mempertimbangkan dengan tepat dan berdayaguna sehingga dapat mendorong peserta didik mencapai kemandirian dalam empat bidang yang menjadi prioritas Bimbingan dan Konseling sekolah, bidang pribadi, belajar, karier dan sosial. Selain membuat program layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah, konselor juga memiliki beberapa tugas utama, salah satunya adalah mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan SK Menpan No.84/1993 ada setidaknya lima tugas pokok seorang konselor antara lain; (1) menyusun program BK, (2) melaksanakan program BK, (3) mengevaluasi program BK, (4) menganalisis hasil pelaksanaan BK, dan (5) melaksanakan tindak lanjut dalam program BK (Sukardi, 2008). Melakukan pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Maka dari itu pelayanan bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama antara personil sekolah bukan hanya konselor, terutama dalam menyusun program untuk layanan yang akan diberikan kepada peserta didik.

Gibson & Mitchell menyatakan bahwa jantung hati dari bimbingan dan konseling terletak pada program konseling. Setiap program yang dibuat selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan, hal tersebut dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh konselor atau pihak lain. Tujuan dari adanya evaluasi adalah agar seorang konselor mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Penerapan program layanan bimbingan dan konseling di Indonesia saat ini menggunakan pola bimbingan dan konseling komprehensif. Komponen program bimbingan dan konseling komprehensif adalah layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem (Gysberg & Henderson, 2012). Evaluasi program bimbingan dan konseling adalah upaya dalam meningkatkan mutu program bimbingan melalui penilaian efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri (Putri, 2019). Penilaian program Bimbingan Konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azizah, Ginting & Utami, 2017).

Pada *The ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs* yang diterbitkan oleh ASCA pada tahun 2012 bahwa Bimbingan dan Konseling

komprehensif memiliki empat komponen yang saling berkaitan (ASCA, 2012). Keempat kerangka program konseling sekolah tersebut di antaranya foundation, management, delivery dan accountability. Pada komponen foundation, ASCA (American School Counselor Association) menjelaskan bahwa foundation berfungsi sebagai landasan yang digunakan oleh konselor dalam menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah. ASCA juga menjelaskan bagaimana foundation di sini sangat penting karena merancang sebuah landasan untuk program bimbingan dan konseling membutuhkan upaya kolaboratif dengan staf sekolah, orang tua/wali dan stakeholders lainnya. Hal itu diupayakan untuk membuat landasan sebuah program yang kuat dan bermanfaat.

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang menuntut ketelitian, kesungguhan dan juga kehati-hatian. Mengingat masih banyak sekali hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi terutama di negara Indonesia. W.S. Winkel dan Sri Hastuti (2004:823) mengemukakan beberapa hambatan yang mengakibatkan evaluasi program bimbingan dan konseling kurang terlaksana dengan baik, salah satu yang kemudian disoroti oleh peneliti adalah mengenai bagaimana guru bimbingan dan konseling sulit menentukan kriteria dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru BK selaku pihak yang akan memberikan sebuah intervensi atau layanan kepada peserta didik mengetahui kriteria-kriteria dalam menyusun sebuah layanan atau program. Pada tahap persiapan dalam merencanakan dan membuat program bimbingan dan konseling di sekolah konselor dapat menetapkan dasar perencanaan (*foundation*) terlebih dahulu (Tim Penyusun, 2016).

Tujuan dari penelitian pada artikel ini adalah untuk mencari perbandingan dan mengevaluasi efektivitas dari sebuah program bimbingan dan konseling pada tahap perencanaan atau *planning* dengan menggunakan model discrepancy. Rumusan masalah yang akan dibahas meliputi apakah terdapat kesenjangan atau perbedaan antara standar ideal perencanaan yang telah disusun oleh American School Counselor Association dengan perencanaan dan implementasi program yang telah dibuat oleh konselor sekolah?.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif kualitatif menggunakan model *Discrepancy Evaluation Method* oleh Provus (1971). Tujuan dari model Discrepancy adalah mengetahui kesenjangan yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat menjadi petunjuk langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan (Mustafa, 2021). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diadministrasikan melalui platform secara online. Instrumen dikembangkan oleh peneliti dengan mengadaptasi instrumen evaluasi pada *foundation* di *ASCA National Model : A Framework for School Counseling Programs* dengan mempertimbangkan juga aspek- aspek yang khas dari peserta didik di Indonesia. Mengingat Model ASCA dikembangkan untuk peserta didik di luar Indonesia. Uji validitas dan juga reliabilitas instrumen diuji oleh satu ahli bahasa dan satu dosen ahli. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, penyajian teori/temuan yang relevan, analisis, menarik kesimpulan (Mustafa, 2021).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tujuh belas item yang telah ditentukan oleh penulis, terdapat beberapa item pertanyaan yang kemudian dari kelima responden menjawab dengan jawaban yang sama. Instrumen yang telah disebar oleh penulis menunjukkan data pada item ke-15 yang berbunyi "Apakah program yang dibuat telah mencakup bidang akademik, karir, pribadi dan sosial?" seluruh responden menjawab dengan pilihan jawaban "Ya". Dari kelima responden tersebut sepakat bahwasanya dalam membuat dan merencanakan

sebuah program yang akan diberikan kepada peserta didik telah mencakup keempat bidang bimbingan dan konseling. Keempat bidang bimbingan dan konseling tersebut adalah akademik, karir, pribadi dan sosial. Untuk beberapa item yang sudah ditentukan, beberapa responden menjawab ada beberapa item dalam instrumen yang belum diketahui untuk dipertimbangkan menjadi landasan dalam menyusun sebuah program layanan Bimbingan dan Konseling.

Pada responden pertama, terdapat satu item pertanyaan instrumen yang merujuk pada standar foundation ASCA yaitu mengenai layanan advokasi yang masih dikembangkan dalam sekolahnya. Layanan advokasi sendiri adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji (Suhertina,2017). Dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah banyak dijumpai permasalahan yang dialami peserta didik yang menyangkut pengembangan kemanusiaan mereka. Potensi yang ada pada diri mereka tidak dapat berkembang secara optimal, mereka yang berbakat tidak dapat mengembangkan bakatnya, mereka yang kecerdasan tinggi kurang mendapatkan rangsangan dan fasilitas pendidikan sehingga bakat dan kecerdasan yang merupakan karunia Tuhan yang tak ternilai harganya itu menjadi terbuang sia-sia (Prayitno, 2002 : 52).

Sehingga konselor/guru bk sebagai personil yang diberi tugas tanggung jawab melaksanakan BK dapat melakukan berbagai upaya melindungi sekaligus membela siswa dari penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dari mal praktek pendidikan. Dengan fungsi advokasi, anak dibela untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-hak pendidikan yang terabaikan. Prayitno (2002:61) mengungkapkan bahwa fungsi advokasi, khususnya advokasi pendidikan, memberikan pembelaan terhadap siswa yang mendapat perlakuan yang bertentangan atau melanggar hak-hak pendidikannya. Dengan fungsi advokasi itu hak-hak pendidikan itu diupayakan untuk ditegakkan. Hal mengenai layanan advokasi juga tertuang dalam Permendikbud no 81A disebutkan bahwa layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah suai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Tujuan layanan advokasi dalam BK yaitu untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu atau terhambat atau bahkan terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil klien akan kembali menikmati hak-haknya, yang dengan demikian klien berada kembali dalam posisi pengembangan diri (Suhertina, 2017). Dengan begitu masih butuhnya perhatian konselor responden pertama untuk melaksanakan layanan advokasi kepada peserta didik dengan memperhatikan dalam proses perencanaan ketika membuat suatu program bimbingan dan konseling. Mengingat layanan advokasi juga sangat penting untuk setiap peserta didik di sekolah.

Pada responden kedua, item yang menonjol yang perlu disoroti adalah item-item yang berkaitan dengan visi dan misi dalam merencanakan atau membuat sebuah program bimbingan dan konseling. Responden kedua menjawab dengan bertolak belakang dari responden-responden lain di mana pada item ke-10,11,12, dan 14 menjawab dengan opsi "Tidak". Pada setiap item-item ke-10,11,12 dan 14 adalah item instrumen yang berkaitan dengan bagaimana sebuah program itu dirancang harus sesuai dengan visi misi nasional, sekolah, dan distrik. Responden kedua masih tidak memperhatikan hal-hal tersebut, bahwa penting kemudian saat visi dan misi program bimbingan dan konseling selaras dengan visi misi sekolah, distrik dan negara. Seorang konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan- tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK harus menjadi bagian integral dari tujuan

pendidikan nasional pada umumnya dan visi/misi yang ada di sekolah secara khusus (ASCA, 2017). Tahap penyusunan program Bimbingan dan Konseling meliputi: merumuskan rasional program, melakukan asesmen kebutuhan, merumuskan tujuan program, menetapkan struktur/isi program, mengidentifikasi sumber-sumber, menyusun kalender bimbingan. Uraian rinci tahap penyusunan program bimbingan dan konseling dimaksudkan seperti; (1) rasional, berisi latar belakang penyusunan program bimbingan didasarkan atas landasan konseptual, hukum maupun empirik. Selain rasional penyusunan program bimbingan dan konseling juga mempertimbangkan visi dan misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi, misi dan tujuan sekolah.

Pada responden ketiga, beberapa item menonjol yang perlu diperhatikan di antaranya mengenai kerja sama konselor dengan pihak lain dalam perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Di mana responden tersebut menjawab "Tidak" yang artinya responden tersebut tidak melibatkan pihak lain dalam perencanaan, pengelolaan, pelayanan maupun evaluasi program. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, terdapat dua tahapan, yaitu (1) tahap persiapan (*preparing*) dan (2) tahap perancangan (*designing*). Tahap persiapan (*preparing*) terdiri dari (1) melakukan asesmen kebutuhan, (2) aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, dan (3) menetapkan dasar perencanaan. Tahap perancangan (*designing*) terdiri atas (1) menyusun rencana kerja, (2) menyusun program tahunan, dan (3) menyusun program semesteran. Dalam merencanakan program semua personil sekolah harus dilibatkan sehingga semua pihak merasa sebagai bagian dari sistem BK yang akan dilaksanakan. selanjutnya pada pengelolaan Jones (1970:98-99) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam kaitannya dengan program BK mencakup enam kegiatan pokok, yaitu (1) *planning*, (2) *organizing*, (3) *assembling*, (4) *directing*, (5) *supervising*, dan (6) *controlling*.

Selanjutnya dalam Permendikbud 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, bahwa konselor mengevaluasi program bimbingan dan konseling untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Menurut Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Konselor dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah melalui prosedur sebagai berikut (Mashudi, 2015): a) Fase Persiapan Fase persiapan; b) fase pelaksanaan; c) fase menganalisis dan fase penafsiran. evaluasi akan lebih efektif jika disosialisasikan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pihak terkait. Memberikan hasil evaluasi kepada pengguna utama dengan cara yang dipahami oleh mereka akan membantu pemanfaatan evaluasi itu sendiri (Sink, Cooney, & Adkins, 2017). Sehingga pelibatan pihak lain dalam perencanaan, pengelolaan serta evaluasi program Bimbingan dan konseling harusnya menjadi perhatian utama pada konselor terkait.

Pada responden keempat kasusnya hampir sama dengan responden pertama di mana responden pertama dalam melaksanakan layanan advokasi masih dalam proses akan tetapi responden keempat ini tidak melaksanakan layanan advokasi sama sekali di sekolah tempat dia mengajar. (Permendikbud) nomor 111 (2014) yang menyebutkan kegiatan layanan advokasi terkategori dalam layanan di luar kelas. Layanan advokasi merupakan perluasan empat komponen layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif dan dukungan sistem. Layanan advokasi dapat dilakukan dalam masing-masing empat komponen layanan bimbingan dan konseling. layanan advokasi adalah layanan yang membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif, dengan memberi pendampingan peserta

didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal.

Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Ada beberapa langkah dalam pelaksanaan layanan advokasi di antaranya; 1) perencanaan; 2) pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan; 3) pelaksanaan layanan; 4) penilaian serta tindak lanjut dan laporan. Layanan advokasi sangat penting dilaksanakan di sekolah karena melalui layanan advokasi nantinya dapat terentaskan masalah klien dari suasana yang menghimpit dirinya sehingga kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi bagus dan lebih baik. Dengan demikian perlunya perhatian khusus konselor responden keempat ini untuk melaksanakan layanan advokasi kepada peserta didik.

Pada responden yang kelima ini berbeda dengan responden-responden sebelumnya yang mana responden kelima ini hampir menjawab semua item dengan jawaban "iya", ada dua item yang dijawab oleh responden kelima ini dengan jawaban "sedang berlangsung" yang pertama pada item ke-7 yang mana item tersebut membahas bagaimana visi program yang menjelaskan bagaimana program konseling dapat dicapai di masa depan. Dalam item ke-7 ini bagaimana visi program yang dibuat oleh konselor dapat menjelaskan keberhasilan mengenai program bimbingan dan konseling yang akan digunakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh (Gladding, 2012) bahwa konselor atau guru BK harus memiliki visi dalam merencanakan dan menerapkan program konseling sekolah yang komprehensif dan bersifat pengembangan dan ini sejalan dengan konsep Gysbers.

Dengan menjawab "sedang berlangsung" pada item ke-17 berarti responden ini sudah berupaya untuk menerapkan dengan kata lain item tersebut sedang dikembangkan oleh responden di sekolah tersebut yang mana visi program yang dibuat dapat menjelaskan keberhasilan program bimbingan dan konseling. Tidak hanya dengan visi program untuk keberhasilan mengenai program bimbingan konseling yang akan digunakan untuk mendukung serta saling membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka juga perlu adanya visi baru konselor sekolah yang diyakini dapat memperkuat eksistensi pelayanan konseling profesional serta bermartabat dan menjadi kekuatan dalam meningkatkan kualitas layanan (Ardimen, 2018). Selain itu program bimbingan dan konseling komprehensif bukan bagian terpisah dari kurikulum sekolah, namun bagian dari kurikulum sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Program BK harus masuk dalam program sekolah, selaras dengan tujuan sekolah (Bhakti & Safitri, 2017). (Hidayat, 2013) mengungkapkan bahwa model bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor sekolah. Model ini dikembangkan berdasarkan berbagai hasil kajian teori, dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh ASCA tentang program bimbingan dan konseling dan profesi konselor sekolah. Program bimbingan dan konseling sekolah yang komprehensif disusun untuk merefleksikan pendekatan yang menyeluruh bagi dasar penyusunan program, pelaksanaan program, sistem manajemen, dan sistem pertanggung jawabannya (Anshari, 2019).

Selanjutnya item kedua dengan jawaban "sedang berlangsung" yang dijawab oleh responden kelima ialah pada item ke-9 yang mana membahas bagaimana visi dalam program dapat dicapai di masa yang akan datang. Dalam hal ini responden berupaya untuk mengembangkan agar visi dalam program dapat dicapai dimasa yang akan datang. Menerapkan standar dan memetakan kekuatan dan kelemahan program BK di sekolah penting untuk menyesuaikan dengan empat elemen atau aspek utama dalam ASCA National Model yakni: fondasi/landasan, sistem penyampaian, sistem manajemen, dan akuntabilitas (Palmer, 2012). Perencanaan program bimbingan dan

konseling harus dipersiapkan dengan baik karena kegiatan ini bertujuan untuk menentukan program yang akan dilakukan. (Sukardi & Kusmawati, 2008). Dalam hal visi dan misi antara program dengan visi dan misi sekolah untuk dapat dicapai dimasa datang harus saling disesuaikan. Sajian visi dan misi bimbingan dan konseling diharuskan sesuai dengan visi dan misi sekolah, maka oleh karena itu sajian visi dan misi sekolah kemudian rumuskan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling (Bhakti, 2017). Menurut (Gysbers & Henderson 2004) Program bimbingan dan konseling harus dikendalikan oleh kepemimpinan yang memiliki visi dan misi yang kuat mengenai bimbingan dan konseling (Zamroni & Rahardjo, 2015). Bimbingan dan Konseling sebagai sebuah program memiliki karakteristik yang sama dengan program sekolah pada umumnya (Gysbers 1976).

Responden kelima ini sudah bisa dikatakan dalam menyusun program bimbingan dan konseling dengan fondasi yang kokoh serta memantau peningkatan untuk masa depannya. Sesuai dengan tugas pokok konselor dalam Menpan No.84/1993 ada lima tugas pokok konselor yakni; 1) menyusun program bimbingan dan konseling, 2) melaksanakan program bimbingan dan konseling, 3) mengevaluasi program bimbingan dan konseling, 4) menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling dan 5) melaksanakan tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya (Putri, 2019).

### SIMPULAN

Hasil dari uraian diatas menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan program (*foundation*) bimbingan dan konseling masih banyak yang belum mengikuti standar yang sebenarnya (standar ASCA). Evaluasi bimbingan dan konseling hadir dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Evaluasi hadir untuk melihat berbagai kelemahan yang disebabkan oleh sebuah layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan hadirnya evaluasi memungkinkan konselor untuk dapat memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan tepat dan optimal sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Implikasi dan saran, perlunya ketelitian dalam perumusan standar dan tujuan program yang jelas dan terukur, jika diawal sebuah standar dalam program tidak jelas, maka evaluasi di tahap selanjutnya akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, disarankan agar tim perencanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orangtua, kepala sekolah dan konselor/guru bk untuk melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A. F. Al. 2019. Manajemen Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk). *Jurnal Visipena*, 10, 5–24.
- Arikunto. S, 2004. *Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Ardimen. 2018. Visi Baru Konselor Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.21067/jki.v4i1.2733>
- American School Counselor Association. 2012. *The ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs, Third Edition*. Alexandria, VA: Author.
- Azizah, F., Ginting, F. B., & Utami, R. S. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. In *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 177-188).
- Badrujaman, A. 2011. *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bhakti, C. P. 2017. Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Untuk Mengembangkan Standar Kompetensi Siswa. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.63>

- Bhakti, C. P., & Safitri, N. E. 2017. Peran Bimbingan Dan Konseling Untuk Menghadapi Generasi Z Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Perkembangan. *Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 10.  
[jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/download/1602/1072](http://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/download/1602/1072)
- Dominika. 2014. *Pemahaman Keterampilan Guru Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : UNY
- Diniaty, A. 2012. *Evaluasi Bimbingan dan Konseling*. Pekan baru: Zanafa Publishing.
- Gibson, R. L., & Mitchel, M. H. 2011. *Bimbingan dan Konseling (Alih Bahasa: Yudi Santoso)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gladding, S. T. 2012. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh. (alih bahasa: P.M Winarno), Edisi Keenam*. Jakarta: Indeks.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. 2012. *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program Fourth Edition*. Alexandria: American Counseling Assosiation.
- Gysbers, N. J. dan P. Henderson. 2004. *Developmental Guidance and Counseling*. Belmont: Brooks and Cole.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. 1976. *Developing and Managing: Your School Guidance and Counseling Program*. American Counseling Association: Alexandria.
- Hidayat, Dede Rahmat. 2013. *Bimbingan Konseling : Kesehatan Mental Di Sekolah*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Jones, J Arthur. 1970. *Principles of Guidance*. New Delhi: Tata McGraww-Hill Publishing Company LTD.
- Kemendikbud. 2014. *Permendikbud No 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mashudi, Farid. 2015. *Pedoman Lengkap Evaluasi & Supervisi Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Diva Press.
- Mustafa, P. S. (2021). Model Discrepancy Sebagai Evaluasi Program Pendidikan. *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 9(1), 182–198.
- Mustofa, Sukatin, Fahrezi, F., & Haqiqi, A. F. (2024). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 4(2), 177–182.  
<https://doi.org/10.57251/ped.v4i2.1623>
- Putri, A. E. 2019. Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 4(2), 39.
- Sukardi, D. K. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhertina. 2017. *Bimbingan dan Konseling*. Dumai : CV. Mifan Karwa Sekawan.
- Palmer, Lauren E. 2012. *Predicting Student Outcome Measures Using the ASCA National Model Program Audit. The Professional Counselor*
- Prayitno, dan Erman Amti, 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka cipta
- Sink, C. A., Cooney, M., & Adkins, C. 2017. *Conducting Large-Scale Evaluation Studies to Identify*. *International Handbook for Policy Research on School-Based Counseling*, 133.
- Sugiyono. 2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Sukardi, D.K. & Kusmawati, D.P.E.N. 2008. *Proses bimbingan dan konse- ling di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Panduan BK SD, SMP, SMA dan SMK. 2106. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan), h. 21

- Tina.M, Trian.E.S, Sumarto. 2021. Evaluasi Program BK Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Mutu Program Layanan BK. *Jurnal consilla*. Vol 4, No 3. 304-312
- Zamroni, E., & Rahardjo, S. 2015. Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1), 0–11. <https://doi.org/10.24176/jkg.v1i1.256>